

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DESERSI OLEH  
ANGGOTA TNI DI WILAYAH PENGADILAN MILITER III-16**

**MAKASSAR**

*(Studi Kasus Putusan Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)*



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum

Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

*Oleh:*

**RAHMAT MAULANA**

**10400114348**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Maulana  
NIM : 10400114348  
Tempat/Tgl. Lahir : Takalala/24 Mei 1995  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Samata  
Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi  
Oleh Anggota TNI di Wilayah Pengadilan  
Militer III-16 Makassar (*Studi Kasus Putusan  
Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019*).**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 05 Februari 2021

Penulis,

Rahmat Maulana

NIM: 10400114348

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota TNI Di Wilayah Pengadilan Militer Iii-16 Makassar (*Studi Kasus Putusan Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019*)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha untuk menyusun dengan sebaik-baiknya, namun tentu saja di dalamnya masih terdapat banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dan tak lupa penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Drs.H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Dr. Rahman Syamsuddin sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum
4. Abd. Rais Asmar S.h., M.H sebagai sekertaris Jurusan Ilmu Hukum
5. Dr. Samsir, S.h., M.H selaku pembimbing I dan Dr. Ashar Sinilele, S.H., M.H selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing penulis dan memberikan arahan serta petunjuk dalam setiap proses penulisan skripsi ini sampai akhirnya dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.
6. Dr. Rahman Syamsuddin, S.H.,M.Hselaku penguji I dan Ashabul Kahpi, S.Ag., M.H, selaku penguji II.
7. Segenap dosen, pegawai, staf jurusan, tata usaha dan pengurus perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atas ilmu, bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Hukum
8. Orang tua tercinta, Rusli Hanreng dan Fatmawaty S.pd serta saudara-saudaraku Rezki Tunnisa S.KM, Ridha Tunnisa S.Pt, Nurul Fahmi, Wahyu Ahmadi ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih

sayang, dukungan, semangat, perhatian dan do'a yang selalu tercurahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

9. Ucapakan terima kasih Untuk Pengadilan Negeri Militer Iii-16 makassar.
10. Ucapan teima kasih kepada teman-teman seperjuangan dan teman-teman jurusan Ilmu Hukum
11. Ucapan terima kasih kepada senior dan teman-teman Resimen Mahasiswa Satuan 703 UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis.
12. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu demi kesempurnaan kritik serta saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Gowa, 05 Februari 2021  
Penulis,



Rahmat Maulana  
NIM: 10400114348

UNIVERSITAS ISLAM NE  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “(Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota TNI Di Wilayah Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor :36-K/PM.III-16/AD/IV/2019)”, yang di susun oleh Rahmat Maulana NIM: 10400114348, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. telah di Uji dan di pertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Samata, 17 Februari 2021

5 Rajab 1442

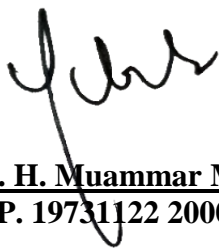
### DEWAN PENGUJI

Ketua :	Dr. H. Muammar Muhamad Bakry, Lc., M.Ag	(.....)
Sekretaris :	Dr. Marilang, S.H., M.Hum	(.....)
Pembimbing I :	Dr. Hamsir, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II :	Ashar Sinilele, S.H., M.H	(.....)
Penguji I :	Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H	(.....)
Penguji II :	Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H	(.....)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,

  
Dr. H. Muammar Muhamad Bakry, Lc., M.Ag  
NIP. 19731122 200012 1 002

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	5
BAB II.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	6
B. Tinjauan Umum Tentang Desersi.....	19
C. Landasan Teori .....	33
D. Tujuan Hukuk Secara Umum .....	33
BAB III.....	35
A. Lokasi Penelitian .....	35
B. Sumber Data .....	35
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Analisa Data .....	36
BAB IV.....	37
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Deersi .....	37
B. Penegakan Hukum Pidana Dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Desersi pada Kasus Putusan Nomor : 35-K/PM.III- 16/AD/IV/2019) .....	39
BAB V.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Implikasi Penelitian .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	60
LAMPIRAN .....	62
RIWAYAT HIDUP .....	65

## **ABSTRAK**

**Nama : Rahmat Maulana**

**NIM : 10400114348**

**Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota TNI di  
Wilayah Pengadilan Militer III-16 Makassar (*Studi Kasus Putusan  
Nomor :35-K/PM.III-16/AD/IV/2019*)**

---

Pokok Permasalahan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pelaku desersi dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku desersi dalam putusan Nomor 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019?

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, cara pengambilan data yaitu dengan cara mengambil salinan putusan perkara Penelitian mengenai masalah tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI dan selain itu penulis juga melakukan Studi Pustaka (library research)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim sesuai dengan unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, serta keyakinan hakim terdakwa sebagai prajurit TNI dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana asersi.

Implikasi penelitian mengenai tindak pidana desersi seharusnya prajurit militer harus mendalami ilmu kedisiplinan yang ditanamkan pada saat memasuki TNI agar menjadikan kedisiplinan tersebut sebagai pedoman.

**Kata kunci : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota TNI di Wilayah  
Pengadilan Militer III-16 Makassar**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Istilah militer berasal dari kata “*miles*” yang dalam bahasa Yunani berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.<sup>1</sup> Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah ujung tombak pertahanan negara Indonesia, yang bertugas untuk menghalau ancaman dari luar maupun dalam negeri. Tentara Nasioanal Indonesia (TNI) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun bersenjata.<sup>2</sup>

Dalam pasal 7 ayat (1) UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok prajurit TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan keterangan diatas sudah jelas bahwa kedudukan TNI sangatlah diandalkan oleh masyarakat Indonesia dibidang pertahanan dan keamanan. Namum pada kenyataan banyak sekali prajurit TNI baik dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) yang melakukan

---

<sup>1</sup>S. R Sianturi,.2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Hal.28

<sup>2</sup>Lihat pasal 1 ayat (21) Ketentuan Umum UU nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasioanal Indonesia

<sup>3</sup>Lihat pasal 7 ayat (1) UU nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasioanal Indonesia



tindak pidana serta meninggalkan tugas kedinasan sekian lama tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan. Tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan kedisiplinan dari seorang prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan tentunya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap prajurit TNI itu sendiri.

Seorang militer juga dituntut dan siap ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia dan tidak boleh meninggalkan tugas serta kesatuan. NKRI adalah harga mati merupakan semboyan yang dipegang teguh para anggota militer. Seorang militer harus rela meninggalkan keluarga pada waktu tertentu demi Negara.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang militer memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Dimana peraturan tersebut juga mencerminkan kedisiplinan dari para anggota militer. Apabila ada anggota militer tidak memenuhi peraturan-peraturan maka anggota disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana murni adalah desersi. Macam-macam tindak pidana prajurit dalam pasal 87 KUHPM yaitu (1) meninggalkan dinas dalam waktu 30 hari, (2) meninggalkan tugas-tugas yang diperintahkan, (3) melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pembedanya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

Seorang prajurit atau anggota militer yang pernah atau tidak melakukan desersi dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengukur tingkat ketaatan dan kedisiplinan dalam kehidupan militer. Ketaatan dan kedisiplinan yang tinggi

terhadap perintah atasan, putusan, maupun aturan-aturan yang berlaku sangat dibutuhkan oleh seorang prajurit dalam kehidupan militernya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat, berdaya guna, dan berhasil guna. Tindak pidana desersi yang terjadi dilingkungan militer dalam penyelesaian perkara pidananya melewati tahapan yang hampir sama dengan penyelesaian tindak pidana diperadilan pada umumnya. Penyelesaian dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan, dan putusan. Hal yang membedakan dengan peradilan umum adalah aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara. Jika dalam peradilan umum yang berhak untuk menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP yaitu :

1. Penyidik
  - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
  - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Saat ini tindak pidana desersi merupakan problematika yang seringkali terjadi dan dilakukan dalam kesatuan militer, dimana seorang prajurit sering meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang sah dan tanpa izin dari atasan. Tindak pidana desersi sangat merugikan Karena tidak menjalankan kewajiban-kewajiban dinas yang seharusnya dilakukan. Apabila tidak ditindak lanjuti dengan serius dikhawatirkan akan berdampak pada anggota kesatuan yang lainnya dan

menurunnya tingkat kedisiplinan dari anggota kesatuan militer. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota TNI di Wilayah Pengadilan Militer Iii-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting, yaitu untuk menegaskan dan membatasi pokok masalah sehingga mempermudah penulis dalam mencapai sasaran. Perumusan masalah diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum proses acara tindak pelanggaran desersi.
2. Bagaimana pelaksanaan proses penegakan hukum pelaku desersi di pengadilan militer III-16 Makassar.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap proses acara perkara desersi
2. Untuk mengetahui pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pelaku desersi di pengadilan militer III-16 Makassar.
3. Tujuan Subjektif

- a. Melengkapi persyaratan akademis guna mencapai derajat strata satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- b. Memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum acara militer baik teori maupun praktek lapangan tentang penegakan hukum tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penyusun perlu mengkaji beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam karya ilmiah ini. Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan yang tersedia baik berupa buku maupun karya ilmiah dan literature lainnya. Ternyata penulis menemukan beberapa kasus desersi pada TNI .

1. Vencentius A.A R dalam karya ilmiah Kajian Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Anggota TNI dalam peradilan in Absentia, membahas tentang kasus Absentia anggotan TNI dan bagaimana putusan dalam peradilan.

2. Moeldjatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana yang membahas pengertian hukum pidana dan asas- asas hukum pidana.

3. Dini Dewi Heniarti, SH., MH dalam bukunya Sistem peradilan Militer di Indonesia yang membahas bagaimana tinjauan teoritis perbandingan hukum dan pembaruan hukum Nasioanal. Dimana juga dibahas tentang peradilan anggota militer terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.

Dari beberapa referensi diatas belum ada yang membahas secara detail tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi pada anggota Tentara Militer Indonesia



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana***

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Didalam perundang-undangan di Indonesia maupun pendapat para sarjana hukum dipergunakan berbagai istilah sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*”. Istilah-istilah lain yang digunakan antara lain delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Semua istilah ini mempunyai makna yang sama yaitu sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaarfeit*”.

Tindak pidana merupakan istilah yang umum digunakan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sudah dapat diterima oleh masyarakat sehingga memiliki *sociologische gelding*. Penggunaan istilah tindak pidana dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Terdapat beberapa pendapat dari Simons, Van Hamel, Marshall, Moeljantno, dan Roeslan Saleh mengenai pengertian tindak pidana yang terdapat dalam buku karangan Mahrus Ali. Menurut Simons mengatakan tindak pidana atau *strafbaarfeit* merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa

*strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Marshall, tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur yang berlaku. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Roeslan Saleh berpendapat mengenai pengertian tindak pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang

#### 1. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana berdasarkan analisis dari Leden Marpaung antara lain sebagai berikut :

##### a. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsure yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” ( *an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan ( *intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence of schuld* ). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzetals zekerheidsbewustjin*).

3) Kesengajaan dengan keinsafan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan

Dalam Al-Quran juga mengatur tentang perbuatan yang tidak disengaja sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al Ahzab(33): 5 yaitu:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ  
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahannya:

Bahwa tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya ,tetapi ( yang ada dosanya ) apa yang disengaja oleh hatimu.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsure dari luar diri pelaku yang terdiri atas

1. Perbuatan manusia berupa :

a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif.

Perbuatan aktif adalah perbuatan yang dilarang dan pelakunya diancam dengan pidana. Sedangkan perbuatan passif adalah perbuatan yang diharuskan yang bila tidak dilakukan diancam dengan pidana.

b. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan.

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

3. Keadaan- keadaan (*circumstances*)



4. Keadaan pada saat dilakukan.
5. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
6. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsure delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsure tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa bebas di pengadilan.

Menurut Satochid Kartanegara dalam buku Laden Marpaung unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa<sup>4</sup>:

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*)
2. Kesalahan (*sculd*)

Selanjutnya menurut Lamintang unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta, :Sinar Grafika.2005)

<sup>5</sup>Lamintang, *Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku dan termasuk di diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( *dolus atau culpa*).
- b. Maksud *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud didalam pasal 5 ayat(1) KUHP.
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedeachteraad*, seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Selanjutnya mengenai unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
  2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
-

Mencermati pendapat para pakar di atas tentang unsur-unsur delik, maka pendapat Prof. Satochid Kartanegara yang memasukkan *toerekeningsvatbaarheid* sebagai unsur subjektif kurang tepat. Hal ini karena tidak semua *ontoeerkeningsvatbaarheid* bersumber dari *overmacht* atau *ambtelijk bevel* (pelaksanaan perintah jabatan).

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada rumusannya.

Adapun batasannya tindak pidana oleh teoritis, yakni Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut paham dualisme, dan Jonkers, Schavendijk yang merupakan penganut paham monisme.

Menurut bunyi batasan yang dibuat oleh Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Diancam dalam perundang-undangan

Sedangkan R. Tresna dalam adami chazawi merumuskan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni<sup>6</sup>:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Selanjutnya menurut Moeljatno dalam buku Erdianto Effendi. Unsur tindak pidana adalah<sup>7</sup>:

---

<sup>6</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014)

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang. Dimuat dalam undang-undang dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai pembuatnya.

Namun jika kita membandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja yang dimukatelah dikemukakan, yaitu *Jonkers* dan *Schravendijk*. Dari batasan yang dibuat *Jonkers* sebagai penganut paham monisme dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah Perbuatan (yang)

1. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
2. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
3. Dipertanggungjawabkan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbedabeda, namun pada hakikat ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

---

<sup>7</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011)

Sementara itu, Loebby Loqman dalam buku Erdianto Effendi menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi: <sup>8</sup>

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Dalam Sianturi unsur-unsur tindak pidana adalah<sup>9</sup>

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan); Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ peraturan perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
4. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)
2. Pembagian Jenis Tindak Pidana.

Tindak pidana /delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu

- a. Kejahatan dan Pelanggaran ( Menurut sistem KUHP).

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku kedua) dan Pelanggaran (Buku ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukuman adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya

---

<sup>8</sup>Erdianto Effendi, Op.cit. Hal 99

<sup>9</sup>S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010)

perbuatan pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-undang adalah perbuatan melanggar yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara.<sup>10</sup>

b. Delik formal dan Materil (Menurut cara Merumuskannya).

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>11</sup> perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.<sup>12</sup> Misalnya pada pencurian (362 KUHP).

Delik Materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Untuk selesainya tindak pidana materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.<sup>13</sup> Misalnya pembunuhan (338 KUHP).

c. Delik *Dolus* dan Delik *Cupla* (Berdasarkan Bentuk Kesamaannya).

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya *dengan sengaja*,

---

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta:Raja Grafindo persada ,2010) h 58

<sup>11</sup>S.T Kansil.Engelin R Palandang, Altje agustinmusa, *Tindak pidana dalam undang-undang nasional*,(Jakarta,2009, h.4

<sup>12</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013),  
h.al. 126

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *Ibid*, hal.126

tetapi mungkin juga dengan kata kata lain yang senada. Contohnya Pasal pasal 162,197,310,338,dll.

Delik *Culpa* adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusan nya menggunakan kata *karena kealpaannya*, misalnya pada pasal 359,360,195. Didalam beberapa terjemahan kadang kadang di pakai istilah *karena kesalahannya*.<sup>14</sup>

Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Passif (*Delicta Omissionis*) (Berdasarkan macam Perbuatannya ).

- d. Delik aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang undang. Contohnya Pasal 362,368 KUHP.
- e. Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHP.
- f. Delik campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu)<sup>15</sup>.

Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/ berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya). Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*h.58

<sup>15</sup> Mohammad Ekaputra, *Dasa-dasar hukum Pidana edisi 2* ,(Medan: Usu Pres,2015).h.102

terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian)

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan).<sup>16</sup>

#### 1. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya).

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materill (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi).<sup>17</sup>

#### 2. Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria (Berdasarkan Sudut Subyek Hukumnya).

Tindak Pidana communia (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak Pidana Propria (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nakhoda pada kejahatan pelayaran.<sup>18</sup>

#### 3. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan (Berdasarkan Perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan).

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.130

<sup>17</sup> Adam Chazawi, *Ibid*.h.131

<sup>18</sup> Adam Chazawi, *Ibid*.h.131-132



Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga)<sup>19</sup>

4. Tindak Pidana dalam bentuk pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan).

Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian)

5. Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian)
6. Tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya).<sup>20</sup>
- g. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I),

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

<sup>20</sup>Mohammad Ekaputra,*Dasa-dasar hukum Pidana edisi 2* ,(Medan: Usu Pres,2015).h.105

untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).<sup>21</sup>

1. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai (Berdasarkan sudut berapakai perbuatannya menjadi sudut larangan).

Tindak Pidana Tunggal (*enkeltvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP.<sup>22</sup>

2. Without victim and eith victim.

*Without victim* adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban.

*With victim* adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.<sup>23</sup>

- h. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutan).

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu.

Delik Berlanjut (*Voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang Perbuatan berlanjut).<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Adam Chazawi, *Op.cit.* h.135-136

<sup>22</sup>Adam Chazawi, *Ibid.* h.136

<sup>23</sup>.S.T Kansil.Engelin R Palandang, Altje agustinmusa, *Tindak pidana dalam undang-undang nasional*, (Jakarta,2009)

i. Delik Politik.

Merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.<sup>25</sup>

**B. Tinjauan Umum Tentang Desersi**

1. Pengertian Desersi

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yaitu merupakan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilakukan oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut yang ditentukan sebagai tindak pidana. Pada dasarnya tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:

a. Diancam karena desersi, militer :

Ke-1 yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny menghindari bahaya perang, menyebrang menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaanlain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama 4 (empat) hari.

Ke-3 Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 Ke-2.

---

<sup>24</sup> Mohammad Ekaputra, *Dasa-dasar hukum Pidana edisi 2*, (Medan: Usu Pres, 2015).

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Raja Grafindo persada: Jakarta, 2010) h.60

Berdasarkan KUHPM Pasal 87 ayat (1) ke-1 dinyatakan sebagai persyaratan pertama desersi. Tetapi selain maksud tersebut ada tiga tujuan lain yang masing-masing sudah dapat menjadikan penghindaran itu menjadi desersi, yaitu hendak menghindar dari bahaya perang, hendak menyebrang ke pihak musuh, dan tanpa ijin hendak memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain. Sedangkan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dirumuskan mengenai waktu ketidakhadiran yang menyebabkan desersi, yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari diwaktu damai dan lebih lama dari 4 (empat) hari diwaktu perang. Disini tidak dipersoalkan maksud dan tujuan dari si pelaku serta tidak dipersoalkan apakah hal itu dilakukan dengan sengaja atau terjadi karena kealpaan saja<sup>26</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3 KUHPM dirumuskan bahwa ketidakhadiran yang sengaja disebut sebagai desersi, apabila mengakibatkan militer bersangkutan tidak dapat melaksanakan perintah untuk ikut melakukan perjalanan ke suatu tempat di pulau lain baik untuk seluruh perjalanan itu dan masalah ini sangat penting bagi TNI-AL dan TNI-AU<sup>27</sup>. Dengan demikian tidak semua seorang militer atas kemauannya sendiri tidak hadir ditempat untuk melaksanakan tugas termasuk desersi. Tetapi harus mempunyai maksud dan tujuan dari pelaku, sebagaimana telah diuraikan, dan jangka waktu yang telah ditetapkan dan akibat yang sudah ditentukan dalam KUHPM.

Menurut Sianturi rumusan tindak pidana desersi dalam KUHPM pasal 87 dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu desersi murni dan desersi sebagai

---

<sup>26</sup>ASS, Tambunan, *ukum Militer Indonesia. Suatu Pengantar.* ( Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005)

<sup>27</sup>ASS, Tambunan, *ukum Militer Indonesia. Suatu Pengantar.* ( Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005)

peningkatan kejahatan THT<sup>28</sup>Desersi murni diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-1 dan desersi sebagai peningkatan kejahatan THTI diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 .Sedangkan dalam KUHP ditemukan beberapa pasal yang berkaitan dengan desersi, seperti pasal 124, 165 dan 236 KUHP. Akan tetapi hal tersebut bukan sebagai pelaku desersi, melainkan sebagai penggerak desersi. Misalnya Pasal 236 KUHP yang berbunyi sebagai berikut,”Barang siapa yang dalam waktu damai dengan sengaja menggerakkan dengan salah satu sarana tersebut Pasal 55 ayat (1) nomor 2 seseorang militer yang dalam dinas negara supaya melakukan desersi atau mempermudahnya dengan salah satu cara tersebut dalam Pasal 56 diancam dengan pidana penjara maksimum Sembilan bulan”. Dari rumusan Pasal 236 KUHP ini, menunjukkan bahwa subyeknya adalah barang siapa yang berarti bisa militer maupun non militer, namun dalam prakteknya adalah non militer. Karena bagi pelakunya seorang militer diterapkan Pasal 87 KUHPM jo Pasal 52 KUHP .

## 2. Pembagian Deseri Menurut Bentuknya

### a. Desersi Murni

Desersi murni adalah desersi yang dilakukan oleh seorang militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk hal itu. Desersi murni diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM, dari rumusan pasal

---

<sup>28</sup>S.R Sianturi,*Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia,2010)

tersebut menunjukkan bahwa tindakan desersi ini diawali dengan perbuatan pergi. Yang dimaksud dengan pergi adalah perbuatan menjauhkan diri dari, menyembunyikan diri dari, meneruskan ketidakhadiran pada atau membuat diri tertinggal untuk pada suatu tempat atau tempat-tempat seharusnya militer itu berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban di atasnya. Namun selama maksud tersebut tidak diwujudkan dalam suatu tindakan yang nyata maka belum dapat dikatakan perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan pergi belum tentu sudah mengubah suatu perbuatan yang melawan hukum. Apabila kepergiannya tanpa ijin, sudah jelas sudah melawan hukum. Akan tetapi apabila kepergiannya tersebut sudah mendapat ijin misalnya cuti, maka kepergiannya tidak bersifat melawan hukum. Jadi jika seorang militer meninggalkan tempat tugasnya karena sudah mendapat ijin/cuti, kemudian ia bermaksud untuk tidak akan kembali lagi selamanya ke tempat tugasnya, tindakannya tersebut sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum, walaupun kepergiannya itu sudah mendapat ijin, sekaligus perbuatan atau tindakannya itu telah memenuhi unsure kejahatan desersi.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-1 ada istilah dengan maksud, hal ini mengundang arti kesengajaan. Jadi perbuatan pergi seperti menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban di atasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara, dilakukan dengan kesadaran atau sesuai dengan kehendaknya yang dalam hal ini untuk mewujudkan maksudnya.

---

<sup>29</sup>S. R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia: 2010)

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dijelaskan bahwa yang disebut musuh termasuk juga pemberontak, negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan perang, sedangkan pada ayat (2) yang disebut perang termasuk juga permusuhan dengan daerah-daerah swapraja, begitu juga perang saudara. Kemudian pada ayat (3) yang disebut masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam, segera sesudah diperintahkan mobilisasi angkatan perang dan selama mobilisasi itu berlaku.<sup>30</sup>

Rumusan Pasal 96 KUHP, menunjukkan bahwa keadaan atau waktu perang tidak semata-mata ketika perang sedang berlangsung, melainkan waktu apabila perang sangat mungkin akan terjadi setelah mobilisasi.

#### b. Desersi Sebagai Peningkatan Kejahatan

Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur didalam KUHPM adalah desersi sebagai peningkatan kejahatan THTI. Seseorang dikatakan tidak hadir tanpa ijin jika ia tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya (S.R Sianturi, 2010 : 262). Desersi sebagai peningkatan THTi diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM sebagai berikut: Diancam karena desersi, militer:

Ke-2 Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari 4 (empat) hari.

---

<sup>30</sup> Lihat pasal 96 (1,2 dan 3) Undang -undang Peradilan Militer



Ke-3 Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang di perintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 87 ke-2.

Berdasarkan rumusan Pasal 87 ayat (1) ke-2, menunjukkan bahwa desersi ini berawal dari kejahatan THTI yang karena atas batas waktunya melebihi 30 (tiga puluh) hari dalam waktu damai dan 4 (empat) hari dalam waktu perang sehingga menjadi tindak pidana desersi. Tidak mempersoalkan unsur kejiwaan dari pelaku, apakah perbuatan itu dilakukan karena salahnya (culpa) atau dilakukan dengan sengaja.

Sedangkan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3 KUHPM, menunjukan bahwa dikatakan desersi jika seorang militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti Pasal 85 ke-2 KUHPM.

### 3. Unsur Unsur Tindak Pidana Desersi

#### a. Tindak Pidana Desersi Murni

Tindak pidana desersi murni diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1, sebagai berikut :

##### 1. Diancam karena deseri, militer :

Ke-1 Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Berdasarkan pengertian Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM, maka ada 4 (empat) unsur tindak pidana desersi murni, yaitu



a. Unsur ke-1 : “Militer”

Dimaksud dengan militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 1 angka 20, yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara. Seorang militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, Kesatuan dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.<sup>31</sup>

b. Unsur ke-2 : “pergi”

Dimaksud dengan pergi (verwijderen) yaitu perbuatan menjauhkan diri dari, menyembunyikan diri dari, meneruskan ketidakhadiran pada atau membuat diri sendiri tertinggal untuk sampai pada, suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Perbuatan pergi ini belum tentu perbuatan melawan hukum. Jika kepergiannya itu tanpa ijin sudah jelas merupakan sifat melawan hukum dan dapat dilihat dari kata-kata tanpa ijin tersebut. Tetapi jika kepergiannya sudah mendapat ijin (cuti) maka kepergiannya tidak melawan hukum. Jadi jika seorang militer meninggalkan tempat tugasnya karena sudah mendapatkan ijin/cuti, kemudian tidak bermaksud untuk kembali lagi ketempat tugas selamanya, maka tindakan

---

<sup>31</sup>Lihat Pasal 1(20) UU nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasioanal Indonesia

tersebut sudah merupakan tindakan melawan hukum, walaupun kepergiannya itu mendapatkan ijin.

c. Unsur ke-3 : “dengan maksud”

Kata-kata “dengan maksud” merupakan pengganti dari kata “dengan sengaja”, merupakan bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya atau tindakan beserta akibatnya

d. Unsur ke-4 : menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Unsur ke-4 ini merupakan tindakan dari pelaku yang dirumuskan secara alternatif. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan kata “atau” yang berarti pilihan. Sehingga apabila diperjelas rumusan unsure ke-4 ini menjadi sebagai berikut : menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, atau menghindari bahaya perang, atau menyebrang ke musuh atau memasuki suatu ikatan dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Apabila tindakan pelaku ini telah memenuhi salah satu tindakan yang dirumuskan dalam unsur ke-4 ini, maka pelaku sudah memenuhi unsur ke empat

b. Tindak Pidana Desersi Sebagai Peningkatan Kejahatan Thiti

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tindak pidana desersi sebagai peningkatan kejahatan THTI diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM. Desersi yang sering kali terjadi dikalangan militer ialah desersi sebagai peningkatan THTI pada waktu damai yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2, yaitu : “militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama tiga puluh hari”. Berikut uraian unsur-unsur tindak pidana desersi dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM

#### 1. Unsur ke-1 : “Militer”

Dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Yang dimaksud dengan militer di Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara. Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

#### 2. Unsur ke-2 : “Dengan Sengaja” atau “Karena Salahnya”

Unsur dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan pelaku, menurut Memori Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dimana seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi perbuatan tersebut beserta dengan akibatnya. Dalam unsur sengaja ini dapat diartikan adanya maksud untuk melakukan perbuatan yang dilarang, berupa pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin dari komandan satuannya. Sedangkan unsur salahnya merupakan salah satu kealpaan (culpa). Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Kealpaan dapat dikatakan kebalikan dari kesengajaan, karena didalam kesengajaan akibat yang timbul merupakan akibat

yang dikehendaki oleh pelaku, tetapi akibat yang timbul dari kealpaan merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku.

### 3. Unsur ke-3 : “Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin”

Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah tidak hadir dikesatuan, sebagaimana semestinya seorang prajurit, misalnya mendahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau ijin dari komandan atau pimpinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah tidak berada ditempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh komandan atau kesatuan atau kewajiban sebagai anggota TNI.

### 4. Unsur ke-4 : “Dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih dari empat hari”

Dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari berarti seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari tiga puluh hari pada saat Negara Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang. Sedangkan dalam waktu perang lebih dari empat hari berarti seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari empat hari pada saat Negara Indonesia dalam keadaan perang atau kesatuannya sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menurut S.R Sianturi, tindak pidana desersi selain diatur dalam KUHPM juga disebutkan dalam Pasal 124, Pasal 165 ayat (1) dan Pasal 236 KUHP yang dijelaskan sebagai berikut

- a. Berdasarkan Pasal 124 ayat (3) ke-2 KUHP dapat diambil kesimpulan jika seorang militer mengajurkan desersi dalam masyarakat militer, ini berarti bahwa anggota militer tersebut telah melakukan penghianatan dan dapat dituntut berdasarkan Pasal 64 KUHPM (perbarengan Tindak Pidana, pasal 63 KUHP);
- b. Berdasarkan Pasal 165 ayat (1) KUHP dapat diambil kesimpulan anggota militer wajib turut serta memelihara ketertiban umum, ini berarti jika anggota militer dengan sengaja tidak memberitahukan adanya niat untuk desersi dalam waktu perang kepada penguasa yang berwenang dapat dituntut dalam Pasal 133 KUHPM;
- c. Berdasarkan Pasal 236 KUHP dapat diambil kesimpulan jika anggota militer dengan cara tersebut Pasal 55 ke-2 KUHP menganjurkan seorang anggota militer supaya melakukan desersi atau mempermudah salah satu cara tersebut Pasal 56 KUHP dapat dituntut dalam Pasal 93 KUHPM<sup>32</sup>

Bentuk –bentuk desersi seperti yang diuraikan diatas pada umumnya bukan merupakan suatu kejahatan dalam masyarakat umum, tetapi dalam lingkungan militer, desersi ditentukan sebagai suatu kejahatan karena terdapat hukum khusus dan lebih keras dan berat bagi anggota TNI.

#### 4. Ancaman Pidana Dan Pemberantasan Pidana Desersi

---

<sup>32</sup>S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010)

Ancaman tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) KUHPM. Pada Pasal 87 ayat (2) KUHPM ancaman pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan untuk desersi yang dilakukan dalam waktu damai, dan pasal 87 ayat (3) KUHPM ancaman pidana penjara maksimum 8 (delapan) tahun (6) bulan untuk desersi yang dilakukan dalam waktu perang.<sup>33</sup> Dengan demikian tindak pidana desersi proses penyelesaian hukumnya secara pidana, karena ancaman pidananya lebih dari 3 bulan. Dan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana ringan, penyelesaian perkaranya dapat dilakukan melalui hukum disiplin prajurit.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin ABRI (sekarang Hukum Disiplin Prajurit), yang dimaksud dengan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya adalah suatu tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>34</sup>

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
- b. Perkaranya sederhana dan mudah pembuktiannya.
- c. Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan TNI atau umum.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.<sup>35</sup> Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan

<sup>33</sup>Lihat Pasal 87 (2 dan 3) Undang Undang Hukum Pidana Militer

<sup>34</sup>Undang- Undang nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit

<sup>35</sup>Lihat Pasal 5(1) Undang- Undang No.26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit

perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Sedangkan hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan dengan hukum disiplin prajurit.

Pemberatan ancaman pidana desersi diatur dalam Pasal 88 KUHPM, dimana ancaman pidananya di duakalikan dari Pasal 87 KUHPM.

#### Pasal 88 KUHPM

Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan 87 diduakalikan<sup>36</sup>

1. Ke-1 Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sajak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.
2. Ke-2 Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat.
3. Ke-3 Apabila dia petindak adalah militer pemegang komando.
4. Ke-4 Apabila dia melakukan melakukan kejahatan itu, sedang dalam menjalankan dinas.
5. Ke-5 Apabila dia pergi kea tau di luar negeri.

---

<sup>36</sup>Lihat Pasal 86 dan 87 Undang- Undang Hukum Pidana Militer

6. Ke-6 Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan melakukan suatu perahu laut, pesawat terbang atau kendaraan yang termasuk pada angkatan perang.
7. Ke-7 Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata atau amunisi.

Dengan pengertian, bahwa maksimum ketentuan ancaman pidana tersebut pada pasal 87 ayat ketiga dinaikkan menjadi lima belas tahun. Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat pertama ke-1 sampai ke-7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya.

Berdasarkan rumusan Pasal 88 KUHPM menunjukkan bahwa ancaman pidana desersi dalam Pasal 87 KUHPM diduakalikan, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Karena pengulangan belum lewat lima tahun
- b. Dua orang atau lebih pergi secara bersama-sama
- c. Jika militer pemegang komando sebagai subyek
- d. Sedang menjalankan dinas
- e. Pergi ke atau di luar negeri
- f. Dengan menggunakan perahu laut, pesawat terbang atau kendaraan angkatan perang
- g. Dengan membawa binatang, senjata atau amunisi
- h. Perbarengan keadaan-keadaan yang memberatkan



### ***C. Landasan Teori***

Hukum merupakan sebuah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Ada banyak penggolongan hukum berdasarkan beberapa hal. Adapun fungsi hukum secara umum adalah menegakkan keadilan dan memberi jaminan keadilan bagi masyarakat.

Definisi dan pengertian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik serta juga mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah. Hukum bisa berupa aturan tertulis atau tidak tertulis. Beberapa sifat hukum antara lain bersifat mengatur tingkah laku manusia, bersifat memaksa masyarakat untuk mematuhi, serta bersifat melindungi hak-hak masyarakat.

Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berisikan perintah dan larangan. Aturan hukum dibuat dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang dalam sebuah negara. Penegakan hukum juga bersifat memaksa, yang berarti jika ada yang melanggar hukum harus diberi sanksi atau hukuman.

Fungsi hukum secara umum adalah untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sosial. Hukum juga memiliki fungsi pengawasan, fungsi penyelesaian sengketa, dan fungsi rekayasa sosial. Banyak pula teori tentang fungsi dan tujuan hukum yang dikemukakan oleh para ahli dan pakar hukum.

### ***D. Tujuan Hukum Secara Umum***

1. Mendatangkan kemakmuran masyarakat mempunyai tujuan

2. Mengatur pergaulan secara damai
3. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat
4. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang
5. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin
6. Sebagai sarana penggerak pembangunan
7. Sebagai fungsi kritis

Tujuan hukum dikaji melalui 3 teori, yaitu

- a. Teori keadilan (Teori etis), dikaji dari sudut pandang falsafah hukum (memberikan keadilan bagi masyarakat)
- b. Teori kegunaan/kemanfaatan (Teori utility), dikaji dari sudut pandang sosiologi (memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, karena hukum diatas kepentingan pribadi maupun golongan).
- c. Teori kepastian hukum (yuridis formal), dikaji dari sudut pandang hukum normatif ( menjaga kepentingan setiap orang sehingga tidak diganggu haknya).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Lokasi Penelitian***

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan maka penulis mengambil lokasi di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa dilokasi berkaitan dengan apa yang penulis teliti.

Sesuai kasus dengan nomor perkara 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019 atas nama terdakwa Cakra Pratu melakukan absen di TON III Rai Yonarhanud 4/AAY bulan Oktober 2018.

##### ***B. Sumber Data***

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut data primer dan datadari bahan kepustakaan adalah data skunder.

Sumber Data bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini. Sedangkan penelitian kepustakaan yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian beberapa kasus dan sumber bacaan lainnya.

##### ***C. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Untuk jenis data primer, Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode interview atau wawancara terhadap hakim guna memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan pembahasan ini.
2. Untuk data sekunder, Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan penulisan ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain bersumber dari:
  - a. Buku-buku, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan dengan objek penelitian.
  - b. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### ***D. Analisa Data***

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi***

Hukum pidana Militer yang hakikatnya memuat peraturan-peraturan untuk mengatur para prajurit TNI yang memiliki sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar. Kaidah-kaidah hukum militer itu berkembang berdasarkan kebutuhan situasi dan kondisi serta dipengaruhi pula oleh pengalaman. Salah satu tindak pidana yang sering ditemukan dalam kesatuan militer adalah tindak pidana desersi.

Tindak pidana desersi merupakan tindakan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini merupakan prajurit TNI dimana terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dari atasan yang berwenang. Tindak pidana desersi juga merupakan tindak pidana militer murni, dimana tindak pidana militer murni adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh militer karena sifatnya khusus militer.

Hukum pidana militer disebut khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang. Hukum Pidana Militer juga memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Hukum Pidana dan hanya berlaku bagi golongan khusus (Militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditujukan padanya.

Selanjutnya tindak pidana desersi memiliki ciri utama yaitu ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat

yang ditentukan baginya, dimna militer tersebut seharusnya berada pada kesatuan untuk melaksanakan kewajiban dinas. Ketidakhadiran tersebut dapat berupa bepergian kesuatu tempat, menyembunyikan diri, menyebrang ke musuh, memasuki dinas militer negara lain, atau membuat dirinya tertinggal dengan sengaja.

Dalam proses pemeriksaan tindak pidana desersi seringkali ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi tidak dapat ditemukan yang menyebabkan pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).

Mengenai pemeriksaan perkara in absentia, hal tersebut diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu:<sup>37</sup>

1. Pasal 141 ayat 10.

Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa.

2. Pasal 143

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan secara in absentia.<sup>62</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

---

<sup>37</sup>Pasal 143 Undang- Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Tentang Peradilan Militer menjelaskan yang dimaksud dengan “pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absentia” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal pelimpahan perkara yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

***B. Penegakan Hukum Pidana Dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Desersi pada Kasus Putusan Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)***

**1. Posisi Kasus**

Berdasarkan pada penelitian yang diamati dari **Kasus Putusan Nomo35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)** Bahwa Cakra adalah Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 8 Oktober tahun 2018 sampai dengan 28 Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam 2018 dan tahun 2019 di Mayonarhanud 4/AAY, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana desersi. Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari.

**2. Dakwaan Oditur Militer**

Berdasarkan Keputusan penyerahan perkara dari Panglima Daerah Militer XIV/Hsn selaku Perwira Penyerah Perkara Kep/67/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Cakra  
 Pangkat Korps/NRP : Pratu / 31110488681090  
 Jabatan : Tamudi 1 Cuk 3 Ton III  
 Kesatuan : Yonarhanud 4/AAY  
 Tempat dan Tanggal lahir : Ujung Pandang, 4 Oktober 1990  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Alamat : Asmil Yonarhanud Y/AA2 jl. Uri  
 Sumoharjo Makasar

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan terdakwa di Persidangan Militer III-16 Makasar, dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa saat itu berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonarhanud 4/AAY dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31110488681090.
- b. Bahwa terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyorhanud 4/AAY sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 atau selama 113 hari secara berturut-turut dalam waktu damai.



- c. Bahwa pada hari senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 WITA saat personel Ton III Yonarhanud melaksanakan pengecekan anggota untuk persiapan apel pagi, ternyata terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap terdakwa dirumah orang tuannya di Paccerakkang Makassar dan keluarganya di Kab.Gowa, namun terdakwa tidak diketemukan dan terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
- e. Bahwa dengan demikian terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 4/AAY yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/ I / 2019/ Idik tanggal 22 Januari 2019.
- f. Bahwa selama terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 4/AAY seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta Kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- g. Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsure-unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 7 tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Nama Tempat Kedudukan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Pertempuran serta Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi dan Oditur Militer Pertempuran.

Menuntut :

Agar perkara Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan permohonan agar

- a. Dipanggil dan dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara ini

Saksi-1 Nama Lengkap : Muh. Muriana Umasugi

Pangkat/NRP : Serda/ 21180206230298

Jabatan : BaYonarhanud 4/AAY

Kesatuan : Yonarhanud 4/AAY :

Tempat tanggal lahir : Ternate, 14 Februari 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asmil Yorhanud 4/AAY jl. Urip Sumiharjo makassar

No. Hp : 0822 3833 6138

Saksi-2 Nama Lengkap : Muh. Saleh

Pangkat/NRP : Praka/31080195910788

Jabatan : Ta Provost  
 Kesatuan : Yonarhanud 4/AAY  
 Tempat tanggal lahir : jeneponto, 7 juli 1988  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Alamat tepat tinggal : Asmil Yonarhanud 4/AAY  
 Jl.UripSumaharjo Makassar  
 No.Hp : 0823 4807 7562

b. Diajukan kepersidangan sebagai barang bukti, berupa :

1. Surat-surat : 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Ton III Rai Yonarhanud 4/AAY bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 an. Pratu Cakra NRP 31110488681090 yang ditandatangani oleh Wadan Yonarhanud 4/AAY an. Kapten Arh Wasis Tamtomo NRP 1107007583084.
2. Barang : Nihil

c. Tuntutan Oditur Militer

Setelah agenda pembuktian, Oditur Militer wajib untuk mempersiapkan tuntutanannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dipersidangan, berikut, berikut ini adalah amar tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dihadapan Majelis Halim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan terdakwa Cakra pada Pengadilan Militer III-16 Makassar:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :Desersi dalam waktu damai, Mohon agar Terdakwa di jatuhi.
2. Pidana pokok : pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.
3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat :

Enam belaslembar Daftar Absensi Ton III Rai Yonarhanud 4/AAY bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 an. Pratu Cakra NRP 31110488681090 yang ditandatangani oleh Wadan Yonarhanud 4/AAY an.Kapten Arh Wasis Tamtomo NRP 1107007583084.

Mohon Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Pertimbangan Hukum Hakim

Berikut ini adalah studi kasus Putusan Nomor **35-K/PM.III-16/AD/IV/2019** yang penulis angkat mengenai tindak pidana desersi.

Hakim yang dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, Majelis hakim dalam perkara Nomor **35-K/PM.III-16/AD/IV/2019** mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lebih dulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada perinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai yang

dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun yang memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu: “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justiable peradilan militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan /ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk pada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonarhanud 4/AAY dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31110488681090.
- b. Bahwa benar sejak diangkat menjadi prajurit TNI AD sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer TNI AD sehingga pada saat kejadian perkara sampai dengan sekarang Terdakwa masih bersatatus militer dinas aktif.
- c. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sekarang ini berdasarkan Keppera dari Pangdam XIV/Hsn selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/67/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur kesatu “Militer”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

2. Unsur Kedua: “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Unsur Kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya

seseorang melakukan tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.<sup>38</sup>

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud “tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada disuatu tempat yang telah ditetapkan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidak hadirannya Terdakwah disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan komandannya sebagaimana lasimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuannya yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 4/AAY sejak tanggal 8 oktober sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 atau selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
- b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 Wita saat personel Ton III Yonarhanud 4/AAY melaksanakan pengecekan anggota untuk persiapan apel pagi, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.
- c. Bahwa benar selanjutnya pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah orang tuanya di Paccerakkang Makassar dan keluarga Terdakwa di Kab. Gowa, namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsure kedua “Yang karena salahnya atau yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### 3. Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa dami, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukanya undang-undang tertentu atau kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa Militer yang berwenang.



Bahwa benar selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 4/AAY seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer. Berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsure ketiga “Dalam waktu damai”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### 4. Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan desersi ini ditentukan jangka waktu dan ketidakhadiran dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Hal ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan terungkapnya fakta sebagai berikut:

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 4/AAY yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/1/2019/Idik tanggal 22 Januari 2019 atau selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

e. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim memutuskan perkara ini, berikut kutipan amar putusannya :

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Cakra Pratu NRP 31110488681090 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai.
  2. Memidanakan terdakwa oleh karena itu dengan :
    - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
    - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
1. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
    - a. 16(enam belas) lembar daftar Absensi Ton III Rai Yonarhanud 4/AAY bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Pratu Cakra NRP 31110488681090 yang ditandatangani oleh Wadan Yonarhanud 4/AAY atas nama Kapten Arh Wasis Tamtomo NRP 1107007583084
    - b. Tetap dilekatkan dalam bebas perkara.
  2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim memutuskan perkara ini, berikut kutipan

f. Analisis Penulis

Dalam suatu perkara ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam beracara. Kopetensi absolut dan kopetensi relative adalah hal penting dalam beracara. Kopetensi absolut merupakan kewenangan suatu badan peradilan yang memiliki hak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sedangkan kopetensi relative merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara dalam mengadili berdasarkan wilayah perkara.

Lebih lanjut mengenai kopetensi absolut, badan-badan peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 yang berbunyi bahwa “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal 20 yang berbunyi bahwa:
  - a. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 18.
  - b. Mahkamah Agung berwenang:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan yang 62 berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undangundang menentukan lain.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang; dan c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

c. Pasal 25 yang berbunyi, bahwa:

1. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara.
2. Peradilan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
3. Peradilan agama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Peradilan militer sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
5. Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara yang penulis teliti yaitu perkara tindak pidana desersi, kompetensi absolut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara desersi adalah peradilan militer, hal tersebut di tandai dengan sifat dari tindak pidana desersi yang merupakan tindak pidana murni yang dilakukan seorang militer.

Setelah penulis menganalisis dakwaan Oditur Militer dalam kasus tersebut, maka dakwaan Oditur Militer telah memenuhi sifat dan hakekat suatu dakwaan, dimana dakwaan diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai identitas terdakwa, uraian dari perbuatan terdakwa serta waktu, tanggal, dan tempat tindak pidana pidana tersebut berlangsung. Hal tersebut yang menjadi dasar penulis bahwa dakwaan tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Melihat penerapan hukum pidana materil yang dikaitkan pula dengan fakta-fakta yang ada maka terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) KUHPM dengan oleh karena terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu:

- a. Militer.
- b. Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- c. Dalam waktu damai.
- d. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2). Hal tersebut juga telah dituangkan dalam putusan Majelis Hakim.

Lebih lanjut suatu putusan tak lepas dari peran penting seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan. Dalam menjatuhkan putusan seorang

Hakim dituntut untuk tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam menjatuhkan putusan Hakim memiliki klasifikasi untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim dituntut mampu melihat fakta-fakta yang ada di persidangan untuk kemudian di jadikan dasar dalam menjatuhkan putusan. Tidak mudah menjadi seorang Hakim dikarenakan dalam menjatuhkan putusan seorang hakim mempunyai kebebasan untuk memutus dan menetapkan suatu perkara.

Berbicara mengenai putusan dalam suatu perkara di kenal 3 (tiga) jenis putusan yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Berdasarkan jenis-jenis putusan tersebut, dalam perkara tindak pidana desersi dengan terdakwa Cakra, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Oditurat Militer dengan menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pidana pokok penjara selama 1 Tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dalam suatu perkara militer salah satu pidana tambahan adalah pemecatan, adapun alasan mengapa terdakwa dipecat dari dinas TNI telah dituangkan dalam pertimbangan hakim dalam putusannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sikap dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan.
2. Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesautannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinas di lingkungan TNI.
3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tedakwa tidak layak lagi dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
4. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa diperintahkan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain baik dan untuk prevensi terhadap disiplin Kesatuannya.

Dalam perkara ini pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia) dimana terdakwa tidak dapat ditemukan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Mengenai pemeriksaan in absetia dalam tindak pidana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer:

a. Pasal 141 ayat (10)

Dalam perkara desersi yang terdakwanya tidak dapat ditemukan, pemeriksaaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa.

b. Pasal 143

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Pada perkara ini Majelis Hakim menyatakan dakwaan Oditur Militer Oditur militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal tersebut telah dituangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) KUHPM

Selanjutnya alasan terdakwa melakukan tindak pidana desersi sangatlah beragam. Berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai perkara desersi in absentia dengan Nomor perkara: **35-K/PM.III-16/AD/IV/2019**, mengenai alasan



dari terdakwa melakukan tindak pidana desersi, namun oleh karena perkara tersebut dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*), maka penulis berpendapat mengenai alasan terdakwa melakukan tindak pidana desersi yang menerangkan bahwa: “Banyak hal yang menjadi alasan terdakwa melakukan tindak pidana desersi, biasanya karena ada masalah pribadi. Masalah pribadi bisa masalah hutang piutang, masalah kasus lain misalnya asusila atau yang berhubungan dengan wanita lain atau dia sudah memiliki pandangan hidup yang mungkin menurut dia baik diluar sehingga terdakwa malas-malasan, juga factor kadar disiplin yang rendah, selain itu usur pengaruh dari luar karena pergaulan dari luar dan pengaruh teman-teman”

Mengenai kadar disiplin yang rendah, hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana seorang prajurit yang memiliki kadar disiplin yang rendah dapat merugikan kesatuan dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain dalam Kesatuan tersebut. Ketidaksiplinan seorang prajurit tidak dapat dipertahankan dalam ruang lingkup TNI hal tersebut berpengaruh dalam kedisiplinan seorang prajurit dikarenakan apa bila Terdakwa tidak di berhentikan dari dinas Militer para prajurit yang lain terpengaruh untuk melakukan tindak pidana yang serupa dan menganggap hal tersebut tidak berakibat diberhentikan dari dinas Militer. Lebih lanjut lazimnya apabila suatu putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaan putusan oleh Majelis Hakim tersebut langsung di jalankan namun bagaimana pelaksanaan putusan dalam pemeriksaan *in absentia*.

## **BAB V PENUTUP**

### ***A. Kesimpulan***

Tindak Pidana Desersi termuat dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Tindak pidana desersi sendiri merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang prajurit militer dimana seorang militer meninggalkan kesatuan lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.

Pelaksanaan penarapan oleh Hakim dalam menetapkan ketentuan terhadap pelaku dalam perkara ini sudah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang nantinya akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, memberi rasa takut bagi terpidana dan para Prajurit.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Mengenai tindak pidana desersi seharusnya prajurit militer harus mendalami ilmu kedisiplinan yang ditanamkan pada saat memasuki TNI agar menjadikan kedisiplinan tersebut sebagai pedoman.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia seharusnya lebih aktif dalam menggali fakta dan alasan dari terdakwa melakukan tindak pidana desersi sendiri



### DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, Rajawali Pers.
- Amiruddin Sjarif, 1996, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.
- ASS, Tambunan, 2005. *Hukum Militer Indonesia. Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM.
- C.S.T Kansil Engelin R Palandang, Altje Agustinmusa, 2009, Tindak Pidana dalam Undang-undang Nasional, Jakarta, 2009.
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, Refika Aditama.
- Laden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, 2010, Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Jakarta, Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko, Peradilan In Absentia di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Marjoto, Hukum Pidana Tentara, Bogor: Politeia, 1965
- Moeljanto, Asas-asas hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Ekspesi dan Putusan Peradilan), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Muhammad Ekaputra, 2015, Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2, Usu Press, Medan.
- Moch Faisal Salam (I), 1994, Peradilan Militer Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
- Rahman Syamsuddin, S.H. (2019). Pengantar Hukum Indonesia. Prenada Media.
- S.R Sianturi, 2010, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia.
- Syamsuddin, R. (2013). Hukum Acara Pidana dalam integrasi keilmuan.
- Syamsuddin, R., & Aris, I. (2014). Merajut Hukum di Indonesia. Mitra Wacana Media.

Syamsuddin, R., & fuady, M.I.N. (2020).Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(1), 63-79.

Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004

Tentang Tentara Republik Indonesia.

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997

Tentang Peradilan Militer



## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No.63 Telp. (0411) 864928-864930 Fax.864923  
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-GowaTelp. 0411-841879, Fax: 0411-82211400

Nomor : B- 2438 /SH.01/PP.00.9/06/2020

Romang Polong, 30 Juni 2020

Sifat : Penting

Lamp. : Proposal

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar

di

Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rahmat Maulana  
 Nim : 10400114348  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan/prodi : Ilmu Hukum (IH)  
 Semester : XII (Dua Belas)  
 Alamat : Samata

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dengan judul skripsi :

**" Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi oleh Anggota TNI di Wilayah Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor:35-K/PM.III-16/AD/IV/2019) "**

Dosen Pembimbing :  
 1. Dr. Hamsir, S.H., M.Hum.  
 2. Ashar Sinilele, S.H.,M.H.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Militer III-16 Makassar, terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 s.d. 30 Juli 2020.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.

  
 Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag  
 Nip. 19731122 200012 1 002

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Romang Polong Gowa  
 (Sebagai Laporan).



# PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Jl. Batara Bira No.5 B KM.16 Makassar Telp. 0411 518080 Fax 0411 518086  
Website : [www.dilmil-makassar.go.id](http://www.dilmil-makassar.go.id) Email : makassar@dilmil.org

Makassar, 08 Juli 2020

Nomor : W3.Mil05/ 96 /PB.00/VII/2020  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum Universitas Islam  
Negeri Alauddin Makassar  
di-  
Gowa

1. Dasar :

a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : B-2438/SH.01/PP.00.9/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi oleh Anggota TNI di Wilayah Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)"

b. Pertimbangan Pimpinan dan Staf.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan Mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat Bapak di atas untuk melakukan penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar.

3. Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Pengadilan Militer III-16

Adeng S. Ag., S.H.  
Letnan Kolonel Cbk NRP 11980005390269

Tembusan :

1. Kadilmilti III Surabaya
2. Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa
3. Sdr. Rahmat Maulana



**PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**

Jl. Batara Bira No. 5 Km. 16 Makassar  
Telp : (0411) 518080, Fax : (0411) 518080, 518086  
Website : [www.dilmil-makassar.go.id](http://www.dilmil-makassar.go.id) Email : [makassar@dilmil.org](mailto:makassar@dilmil.org)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W3.Mil05/ **73** /KP.05.1/VII/2020

Merujuk Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : B-2438/SH.01/PP.00.9/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi oleh Anggota TNI di Wilayah Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)" dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar :

Nama : Rahmat Maulana  
NIM : 10400114348  
Jurusan : Ilmu Hukum

Benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Jl. Batara Bira, No. 5 KM. 16 Baddoka, Biringkanaya, Makassar, mulai dari tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Juli 2020

a.n. Kepala Pengadilan Militer III-16

Sekretaris

Andi Dafa Uling, S.H.  
Kapten Sus NRP. 535949



## RIWAYAT HIDUP



Rahmat Maulana, Lahir pada tanggal 24 Mei 1995, di Takalala Kabupaten ,Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan Rusl dan fatmawati Spd. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 133 Takalala pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Marioriwawo, Soppeng dan selesai tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan di sekolah Menengah Atas di SMAN model 1 Marioriwawao , Soppeng dan selesai pada tahun 2014. Penulis diterima di perguruan tinggi Negeri (PTN) melalui Jalur UMM dan diterima di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.